



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)**



JL. KYAI JEBAT NO. 881 A DEMAK TELP (0291) 685660

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2022 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang diturunkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah yang pertama indeks kepuasan masyarakat dari target 84,75 tercapai 85,705 atau 101,12%, indikator kinerja yang kedua persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja ketiga nilai SAKIP BPKPAD target 81,75%, realisasi 81,66% capaian 99,88%, indikator kinerja yang keempat persentase indikator kinerja strategis BPKPAD yang mencapai target 100% realisasi 101,53% capaian 101,53%, indikator kinerja yang kelima hasil opini BPK target WTP Realisasi WTP prosentase 100%, Indikator Kinerja Yang Keenam Persentase Tata Kelola Keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan target 100% realisasi 100% capaian 100%, indikator kinerja yang ketujuh derajat otonomi fiskal target 17,35 realisasi 17,8 capaian 102,59%, indikator kinerja yang kedelapan persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik target 100% realisasi 100% capaian 100%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, Januari 2023

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**



Drs. Agus Musyafak, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19670821 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. GAMBARAN UMUM 1

 B.Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi..... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

 A.RENCANA STRATEGIS..... 9

 B.RENCANA KINERJA TAHUNAN 11

 C.PERJANJIAN KINERJA 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022..... 17

 A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 18

 B.REALISASI ANGGARAN 87

BAB IV PENUTUP 93

 A.Simpulan 93

 B.Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang 95

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu “Demak bermartabat maju dan sejahtera”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki 3 (Tiga) Misi, adapun Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan misi ke-1 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya”.

Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan alat ukur Indikator Kinerja baik indikator kinerja tujuan, sasaran, program selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik BPKPAD
Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat target 84,75 tercapai 85,705 atau 101,12%
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang renponsif
Indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target 100% realisasi 100% capaian 100%
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan daerah
Indikator Kinerja Nilai SAKIP BPKPAD target 81,75%, realisasi 81,66% capaian 99,88%
4. Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD
Indikator Kinerja Nilai Persentase indikator kinerja sasaran startegis BPKPAD yang mencapai target 100% realisasi 101,53% capaian 101,53%
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja Opini BPK target WTP Realisasi WTP prosentase 100%
6. Terwujudnya tata kelola keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal
Indikator Kinerja 6.1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan target 100% realisasi 100% capaian 100%
Indikator Kinerja 6.2.Derajat Otonomi Fiskal target 17,35 realisasi 17,8
Indikator Kinerja 6.3. Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik target 100% realisasi 100% capaian 100%

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2022 dari Pagu Rp. 470.095.044.819,- dapat terealisasi sebesar Rp. 463.626.301.563 atau 98,62% ini menunjukkan kinerja keuangan sangat baik.

BAB I PENDAHULUAN

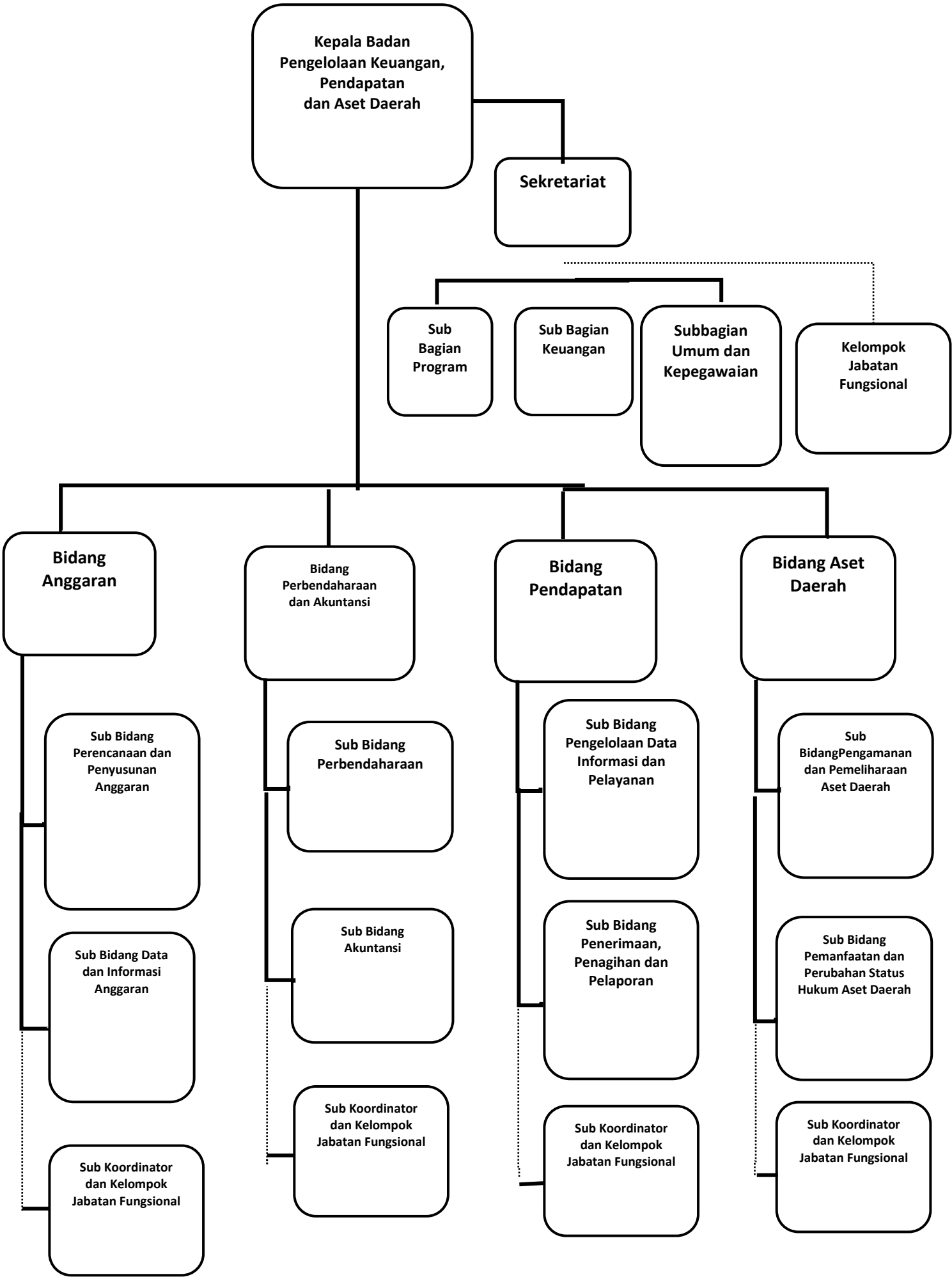
1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, sesuai Bagian Kedua Pasal 3 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai Bagian Ketiga Pasal 4 mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, pendapatan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

TABEL 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK



Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi Anggaran;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pendapatan
 1. Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi dan Pelayanan;
 2. Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset Daerah
 1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah;
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

A. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

B. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel. 1.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPKPAD Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMA Sederajat	5	3	13	2	23
3	D2	-	1	-	-	1
4	D3	1	-	1	3	5
5	S1	9	9	9	10	37
6	S2	14	4	-	-	18
7	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	29	17	24	15	85

Dari jumlah pegawai sebanyak 85 orang terdiri PNS 46 atau (54%) dan Non PNS 39 atau (46%). Jumlah 46 PNS tersebut jumlah laki-laki sebanyak 29 orang atau 63% dan perempuan sebanyak 17 orang atau 37% sedangkan dari jumlah Non PNS 39 orang terdiri laki-laki 24 orang atau 62% dan perempuan 15 orang 38%. Kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai PNS berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel.1.3

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	7	-	7
2	Golongan III	16	15	31
3	Golongan IV	6	2	8
	Jumlah	29	17	46

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah pegawai BPKPAD yang berstatus PNS. Dari jumlah 46 pegawai tersebut 29 orang atau 63% laki-laki dan 17 atau 37% orang perempuan .

C. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2022. Sarana dan prasarana yang tersedia di

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada table 2.3 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana-Prasarana di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Demak 2022

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1975	1200 m²	Baik
2	Gedung Parkir	2008	192 m²	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2014	2 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2016	4 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	2018	2 Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 4	2019	1 Unit	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 4	2020	1 Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	4 Unit	Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	5 Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2011	4 Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2012	4 Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2018	1 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2019	4 Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2020	6 Unit	Baik
15	Gen Set	2013	1 Unit	Baik
16	Gen Set	2016	1 Unit	Baik
17	Gen Set	2019	1 Unit	Baik
18	Gen Set	2020	1 Unit	Baik
19	Server	2010	2 Unit	Baik
20	Server	2015	4 Unit	Baik
21	Server	2016	4 Unit	Baik
22	Server	2018	2 Unit	Baik
23	Server	2020	4 Unit	Baik
24	PC Unit	2010	5 Unit	Baik
25	PC Unit	2011	10 Unit	Baik
26	PC Unit	2012	5 Unit	Baik
27	PC Unit	2015	8 Unit	Baik
28	PC Unit	2017	4 Unit	Baik

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
29	PC Unit	2018	5 Unit	Baik
30	PC Unit	2019	14 Unit	Baik
31	PC Unit	2020	8 Unit	Baik
32	Notebook/Laptop	2010	4 Unit	Baik
33	Notebook/Laptop	2012	4 Unit	Baik
34	Notebook/Laptop	2014	6 Unit	Baik
35	Notebook/Laptop	2015	4 Unit	Baik
36	Notebook/Laptop	2017	3 Unit	Baik
37	Notebook/Laptop	2018	7 Unit	Baik
38	Notebook/Laptop	2019	9 Unit	Baik
39	Notebook/Laptop	2020	4 Unit	Baik
40	LCD Proyektor	2010	2 Unit	Baik
41	LCD Proyektor	2012	1 Unit	Baik
42	LCD Proyektor	2015	2 Unit	Baik
43	LCD Proyektor	2018	2 Unit	Baik
44	LCD Proyektor	2019	1 Unit	Baik
45	Roll Opec/Filing Besi	2011	2 Unit	Baik
46	Roll Opec/Filing Besi	2012	1 Unit	Baik
47	Roll Opec/Filing Besi	2014	2 Unit	Baik
48	Roll Opec/Filing Besi	2016	2 Unit	Baik
49	Roll Opec/Filing Besi	2018	4 Unit	Baik
50	Roll Opec/Filing Besi	2019	5 Unit	Baik
51	Lemari Kayu	2010	8 Unit	Baik
52	Lemari Kayu	2011	5 Unit	Baik
53	Lemari Kayu	2014	10 Unit	Baik
54	Lemari Kayu	2017	4 Unit	Baik
55	Lemari Kayu	2018	6 Unit	Baik
56	Lemari Kayu	2019	5 Unit	Baik
57	Rak Besi	2015	5 Unit	Baik
58	Rak Besi	2018	4 Unit	Baik
59	Rak Besi	2019	6 Unit	Baik
60	Rak Kayu	2010	2 Unit	Baik
61	Rak Kayu	2013	6 Unit	Baik
62	Rak Kayu	2015	2 Unit	Baik
63	Rak Kayu	2016	2 Unit	Baik

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
64	Rak Kayu	2019	4 Unit	Baik
65	Lemari Kaca	2018	2 Unit	Baik
66	Lemari Kaca	2019	4 Unit	Baik
67	Lemari Kaca	2020	2 Unit	Baik
68	Porforator	2017	2 Unit	Baik
69	Porforator	2019	2 Unit	Baik
70	Lemari ES/Kulkas	2012	2 Unit	Baik
71	Lemari ES/Kulkas	2015	2 Unit	Baik
72	Lemari ES/Kulkas	2017	1 Unit	Baik
73	AC	2010	7 Unit	Baik
74	AC	2012	5 Unit	Baik
75	AC	2015	10 Unit	Baik
76	AC	2017	4 Unit	Baik
77	AC	2018	7 Unit	Baik
78	AC	2019	5 Unit	Baik
79	Kipas Angin	2010	4 Unit	Baik
80	Kipas Angin	2017	2 Unit	Baik
81	Kipas Angin	2018	4 Unit	Baik
82	TV Kantor	2010	4 Unit	Baik
83	TV Kantor	2012	7 Unit	Baik
84	TV Kantor	2015	4 Unit	Baik
85	TV Kantor	2018	6 Unit	Baik
86	TV Wisma	2020	18 Unit	Baik
87	Filing Device	2020	4 Buah	Baik
88	Thermo Gun	2020	3 Unit	Baik
89	Penyemprot Otomatis	2020	2 Unit	Baik
90	Sound System	2022	1 Set	Baik
91	Apar	2022	3 Unit	Baik
92	Finger Print	2022	2 Unit	Baik
93	Soft Ware Aplikasi	2002	1 Set	Baik
94	Server	2022	1 Unit	Baik
95	Accessories	2022	1 Set	Baik
96	Aplikasi	2022	2 Set	Baik
97	1 Paket Audio Visual	2022	3 Set	Baik
98	All In One	2022	1 Unit	Baik

No.Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah barang	Keterangan
1	2	3	4	5
99	Lemari Kaca	2022	1 Unit	Baik
100	Sarana Dan Prasarana Lainya	–	–	
Jumlah			382 Unit	Baik

D. Fungsi Strategis BPKPAD Kabupaten Demak

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam RPJMD melaksanakan misi kesatu yaitu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya , dengan tujuan dalam RPJMD yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai adalah pertama meningkatnya kinerja pelayanan publik pemerintahan indikator sasaran nilai IKM daerah kedua meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator pertama nilai SAKIP daerah dan indikator kedua Indek Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat tiga sasaran dalam renstra BPKPAD Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif.
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD.
3. Terwujudnya tata kelola keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal.

E. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja di setiap OPD;
2. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.
3. Perlunya melaksanakan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perlunya tertib penatausahaan aset daerah.
5. Penetapan APBD dan APBD Perubahan yang harus tepat waktu.
6. Pengelolaan pendapatan daerah belum maksimal sesuai dengan potensi yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan

tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

1) Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu “**Demak bermartabat, maju, dan sejahtera**”.

2) Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah dalam rangka melaksanakan misi pertama dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu “**Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan bermasyarakat yang agamis kondusif dan berbudaya**”.

3) Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 Tujuan BPKPAD yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD dengan indikator tujuan Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPKPAD dengan indikator tujuan Nilai Sakip BPKPAD
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan indikator tujuan Hasil Opini BPK

4) Sasaran

Berdasarkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, sasaran yang akan dicapai sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang tentang Hasi Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, pada tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD
Memiliki indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat dengan Target 84,75.
- 2) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif

Memiliki indikator Kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 100%.

- 3) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Memiliki indikator Kinerja Nilai SAKIP BPKPAD dengan target 81,75.

- 4) Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD

Memiliki indikator Kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target dengan target 100%.

- 5) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Memiliki indikator kinerja hasil opini BPK dengan target WTP.

- 6) Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal

Memiliki indikator kinerja pertama persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan dengan target 100%, indikator yang kedua derajat otonomi fiskal dengan target 17,35, dan indikator yang ketiga persentase perangkat daerah yang mampu mengelola aset dengan baik dengan target 100%.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RKT murni dan RKT perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Bupati Demak. Adapun RKT murni dan perubahan sesuai dengan tabel 2.1.

Tabel. 2.1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN MURNI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,75
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,75
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,35
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Tabel.2.2

Program dan Anggaran Murni 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.539.346.068	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.996.016.000	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	650.000.000	Sumber dari APBD

4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.494.381.450	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	468.679.743.518	

Tabel di atas adalah sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan perjanjian kinerja murni. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan dapat dilihat sesuai Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,75
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,75
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,35
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Sedangkan program dan anggaran yang digunakan untuk mengintervensi rencana kinerja tahunan perubahan untuk tahun 2022 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4

Program dan Anggaran 2022 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.930.811.758	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.981.662.000	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.130.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.052.571.061	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	470.095.044.819	

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,75
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,75

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,35
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Dengan didukung program dan anggaran murni 2022 sebagaimana tabel 2.6

Tabel 2.6

Program dan Anggaran Murni 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGA N
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.539.346.068	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.996.016.000	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	650.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	24.494.381.450	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	468.679.743.518	

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,75
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,75
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,35
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%

Tabel 2.8

Program dan Anggaran 2022 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.930.811.758	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.981.662.000	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.130.000.000	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.052.571.061	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	470.095.044.819	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2022 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.1

Skala Pengukuran

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	90 s/d 100%	Sangat Baik
2	80 s/d 89%	Baik
3	50 s/d 79 %	Cukup Baik
4	Kurang dari 49 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator

MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Tabel 3.2

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan 2022

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	Prosentase Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%
	persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokumen(LK Tahunan))	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya nya (Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	100%

Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 unit	9 unit	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	100%

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	100%
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 Unit	12 Unit	100%

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340 Laporan	3311 Laporan	973,82%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100%

lapangan				
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	366 unit	366 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100% Tepat Waktu 100%	100% Tepat Waktu 100%	100% 100% 100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100%

Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	100%

Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	100%
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan /pemotongan dan penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	36 laporan	36 laporan	100%

perhitungan pihak ketiga (PFK)	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dok	8000 dok	100%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 org	42 org	100%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	100%
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 dok	4 dok	100%

Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	100%

Pembinaan akuntansi,pe laporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	100%

Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	100%
Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	100%

Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	7,2%	144%

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	448.422.777.712	477.199.961.524,94	106,42%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 dok	480 dok	100%

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada program ini ada 6 kegiatan 17 sub kegiatan dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan target 2022 adalah 100% tercapai 100% Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan tahun 2022 terlaksana dengan kategori sangat baik.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 dengan indikator program yaitu Persentase penetapan APBD tepat waktu, target tepat , tercapai tepat waktu, Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP target 100% tercapai 100% dan Persentase penyampaian LKPD tepat waktu tercapai tepat waktu. Capaian realisasi kinerja tahun 2022 tercapai dengan kategori sangat baik.

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan 11 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 adalah 100% telah tercapai 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2022 tercapai dengan kategori sangat baik.

4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan 6 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 adalah Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen) Target 5% telah tercapai 7,2% atau 144%. Capaian tahun 2022 target kinerja indikator program berupa tingkat pertumbuhan PAD dapat tercapai dengan maksimal hal ini sangat mengembirakan mengingat pada tahun sebelumnya pertumbuhannya sudah ada peningkatan namun belum bisa mencapai target namun untuk tahun 2022 target telah tercapai dan pertumbuhannya sangat baik sekali. Selain tercapainya target pertumbuhan target PAD yang ditetapkan sudah tercapai pula hal ini terbukti capaian target PAD pada tahun 2022 dari target PAD sebesar Rp. 448.422.777.712 telah terealisasi sebesar Rp. 477.199.961.524,94 atau sebesar 106,42%.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Tabel 3.3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,75	85,705	101,12%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,75	81,66	99,88%
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100	101,53	101,53%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP	WTP	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100	100	100%

		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,35	17,8	102,59%
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100	100	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2022 dengan target 84,75 dan realisasi sebesar 85,705 atau 101,12% hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2022 masuk dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 2 :** Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif *dengan target indikator kinerja* Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2022 dengan target 100% tercapai 100% hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran tahun 2022 dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 3:** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* Nilai SAKIP BPKPAD. Tingkat capaian pada tahun 2022 dari target 81,75 tercapai 81,66 atau 99,88% Jika dilihat dari capaian tahun 2022 memang belum bisa 100% hal ini disebabkan karena indikator penilaian ditahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 sehingga ada instrumen penilaian di 2022 yang harus dicukupi belum sepenuhnya dapat disajikan dan ini terjadi pula di seluruh OPD. Meskipun demikian capaian tersebut masih dalam kategori sangat baik karena masih berada di kisaran 90-100%.
- **Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target. Tingkat capaian pada tahun 2022 dengan target 100 tercapai 101,53 atau 101,53% .Hal ini menunjukkan capaian strategis pada tahun 2022 dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 5 :** Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* hasil opini BPK. Tingkat capaian target 2022 tercapai dengan sangat baik yaitu target WTP tercapai WTP pula dan capaian ini pada tahun 2022 merupakan capaian WTP yang ke-6. Hal ini bagi pemerintah Kabupaten Demak merupakan suatu kebanggaan, harapannya tahun-tahun berikutnya pun WTP dapat dipertahankan dengan kualitas yang lebih bagus lagi tanpa ada catatan.
- **Sasaran Strategis 6 :** Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal untuk sasaran ke-6 ini

memiliki 3 indikator kinerja. Yang pertama Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan untuk tahun 2022 tercapai 100% dari target 100%, hal ini menunjukkan capaian dalam katgori sangat baik. Untuk indikator yang kedua yaitu Derajat Otonomi Fiskal pada tahun 2022 dari target 17,35 tercapai 17,8 atau 102,59% hal ini menunjukkan capaian kinerjanya dalam kategori sangat baik, Dan untuk indikator yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dari target 100% tahun 2022 tercapai 100%, hal ini menunjukkan capaian kinerja dalam kategori sangat baik.

2.MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN 2021

Tabel.3.4
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan 2021

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2021	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2021 DAN 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Persen	100%	100%	100%
	persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokumen(LK Tahunan)	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangan nya (Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	100%

Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 unit	9 unit	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	100%

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	100%
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 Unit	12 Unit	100%

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	100%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3311 Laporan	340 Laporan	973%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa KOMunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan ,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	100%

atau lapangan				
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	366 unit	366 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP	100% Tepat Waktu 100%	100% Tepat Waktu 100%	100% 100% 100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100%

Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	100%

Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	100%
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan /pemotongan dan penyetoran perhitungan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	36 laporan	36 laporan	100%

pihak ketiga (PFK)	(PFK)			
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dok	8000 dok	100%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	42 org	42 org	1100%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	100%
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 dok	4 dok	100%

Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	100%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	100%

Pembinaan akuntansi,pe laporan dan pertanggung awaban pemerintah kabupaten/k ota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLA AN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	100%

Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	100%
Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	100%

Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	100%

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	7,2%	1,21%	595 %
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	477.199.961.524,94	445.009.169.156,79	<u>107,23%</u>
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	100%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	100%

Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian ,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	480 dok	480 dok	100%

MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 dan Tahun 2021

Tabel 3.5

Perbandingan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 dan 2021

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2021	REALISASI KINERJA 2021	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 2021 DAN 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Person	100%	100%	100%	100%	100%
	persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokumen(LK Tahunan)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangannya (Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	100%

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 OB	85 OB	85 OB	85 OB	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	85 Paket	85 Paket	85 Paket	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	85 org	85 org	85 org	85 org	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	62 Paket	62 Paket	62 Paket	62 Paket	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	85 Paket	85 Paket	85 Paket	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	32 Unit	32 Unit	32 Unit	32 Unit	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	340 Laporan	3311 Laporan	340 Laporan	340 Laporan	973%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JAsa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%

Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	366 unit	366 unit	366 unit	366 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu (Dengan Satuan:persen) -persentase perangkat	100% Tepat Waktu 100%	100% Tepat Waktu 100%	100% Tepat Waktu 100%	100% Tepat Waktu 100%	100% 100% 100%

	daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP					
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran yang Disusun	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Disusun	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	100%
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan Perbendaharaan	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	240 dok	240 dok	240 dok	240 dok	100%
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	232 dok	232 dok	232 dok	232 dok	100%

Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42 dok	42 dok	42 dok	42 dok	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	100%

	Fihak Ketiga (PFK)					
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dok	8000 dok	8000 dok	8000 dok	100%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	42 org	42 org	42 org	42 org	1100%
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%

Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 org	110 org	110 org	110 org	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan administrasi Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%

Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Person)	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	112 dok	112 dok	112 dok	112 dok	100%
Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	125 dok	125 dok	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	125 dok	125 dok	125 dok	125 dok	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%

Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	112 laporan	112 laporan	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 laporan	25 laporan	25 laporan	25 laporan	100%
Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 dok	36 dok	36 dok	36 dok	100%

Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	20 laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	7,2%	5%	1,21%	595 %
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	448.422.777.712	477.199.961.524,94	405.271.709.834	445.009.169.156,79	<u>107,23%</u>

Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	110 laporan	110 laporan	110 laporan	110 laporan	100%
Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60300 laporan	60300 laporan	60300 laporan	60300 laporan	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60143 dok	60143 dok	60143 dok	60143 dok	100%
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaa n Serta Pengendalian dan Pengawasan	480 dok	480 dok	480 dok	480 dok	100%

	Pajak Daerah					
--	--------------	--	--	--	--	--

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2021 sesuai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada program ini ada 6 kegiatan 17 sub kegiatan dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan target 2022 adalah 100% tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2021 adalah 100% telah tercapai 100% pula . Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

2. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pada program ini ada 4 kegiatan 19 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 dengan indikator program Persentase penetapan APBD tepat waktu target tepat waktu tercapai tepat waktu, Persentase perangkat daerah menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP target 100% tercapai 100% dan Persentase penyampaian LKPD tepat waktu tercapai tepat waktu. Untuk capaian tahun 2021 capaian indikatornya juga sama. Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

3. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan 11 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 adalah 100% telah tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2021 adalah 100 telah tercapai 100% pula . Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pada program ini ada 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2022 adalah Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen) Target 5% telah tercapai 7,2 % sedangkan Target kinerja Tahun 2021 adalah 5% telah tercapai 1,21%. Untuk tahun 2022 target sudah tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target hal ini sangat membanggakan mengingat untuk tahun 2021 target belum dapat tercapai meskipun ada peningkatan capaian dari tahun 2020. Namun demikian jika dilihat dari target PAD yang ditetapkan 2 tahun berturut turut sudah tercapai dengan sangat menggembirakan hal ini terbukti capaian

target PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 405.271.709.834 terealisasi sebesar Rp 445.009.169.156,79 atau 109,80% sedangkan pada tahun 2022 dari target PAD sebesar Rp. 448.422.777.712 telah terealisasi sebesar Rp. 477.199.961.524,94 atau sebesar 106,42%.

3.MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2022 dan TAHUN 2021

Tabel.3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Prosentase (%) Realisasi 2022 dan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2021	2021	2022	2022	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	84,5	84,512	84,75	85,705	101,41%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	81,54	81,55	81,75	81,66	100,13%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Prosentase (%) Realisasi 2022 dan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2021	2021	2022	2022	
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	100%	100%	100%	101,53%	101,53%
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
		2.Derajat Otonomi Fiskal	17,25	17,25	17,35	17,8	103,18%
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Strategis 1 :** Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Indek Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2022 dengan target 84,75 dan realisasi sebesar 85,705 atau 101,12% sedangkan untuk tahun 2021 dari target sebesar 84,5 terealisasi sebesar 84,512 hal ini menunjukkan bahwa realisasi tahun 2022 ada peningkatan sebesar 1,193 atau 1,41% angka ini menunjukkan bahwa pada sasaran pertama mengalami peningkatan 1,41% dari tahun sebelumnya. Capaian ini masuk dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 2 :** Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif *dengan target indikator kinerja* Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti Masyarakat Tingkat Capaian pada tahun 2022 dengan target 100% tercapai 100% sedangkan untuk tahun 2021 dari target sebesar 100% tercapai 100% pula, hal ini menunjukkan bahwa capaian sasaran kedua 2 tahun berturut-turut bisa mencapai target yang ditetapkan capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 3:** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* Nilai SAKIP BPKPAD. Tingkat capaian pada tahun 2022 dari target 81,75 tercapai 81,66 atau 99,88% sedangkan untuk tahun 2021 dari target 81,54 tercapai 81,55. Jika dilihat dari capaian tahun 2022 memang belum bisa 100% hal ini disebabkan karena indikator penilaian ditahun 2022 berbeda dengan tahun 2021 sehingga ada instrumen penilaian di 2022 yang harus dicukupi belum sepenuhnya dapat disajikan dan ini terjadi pula di seluruh OPD. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 ada peningkatan sebesar 0,11% yaitu dari 81,55 menjadi 81,66 pada tahun 2022. kedepan diharapkan target nilai SAKIP bisa tercapai dengan baik sesuai target bahkan lebih. Hal ini menunjukkan 2 tahun terakhir capaian strategis dalam kategori sangat baik.
- **Sasaran Strategis 4 :** Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD *dengan target indikator kinerja* Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target. Tingkat capaian pada tahun 2022 dengan target 100 tercapai 101,53 atau 101,53% sedangkan untuk tahun 2021 dari target 100 tercapai 100 atau 100%. Hal ini menunjukkan 2 tahun terakhir capaian strategis dalam kategori sangat baik.

- **Sasaran Strategis 5** : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah *dengan target indikator kinerja* hasil opini BPK. Tingkat capaian baik target 2022 maupun 2021 tercapai dengan sangat baik yaitu target WTP tercapai WTP pula dan capaian ini pada tahun 2022 merupakan capaian WTP yang ke-6. Hal ini bagi pemerintah Kabupaten Demak merupakan suatu kebanggaan, harapannya tahun-tahun berikutnya pun WTP dapat dipertahankan dengan kualitas yang lebih bagus lagi tanpa ada catatan.
- **Sasaran Strategis 6** : Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal untuk sasaran ke-6 ini memiliki 3 indikator kinerja. Yang pertama Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan untuk tahun 2022 maupun 2021 dari target 100% tercapai 100% hal ini menunjukkan capaian 2 tahun terakhir dalam katgori sangat baik. Untuk indikator yang kedua yaitu Derajat Otonomi Fiskal pada tahun 2022 dari target 17,35 tercapai 17,8 atau 102,59% hal ini menunjukkan capaian kinerjanya dalam kategori sangat baik sedangkan target tahun 2021 dari 17,25 tercapai 17,25 atau 100% hal ini menunjukkan capaian kinerja di tahun 2021 dalam kategori sangat baik pula. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dari target 100% baik tahun 2022 maupun 2021 semua tercapai 100%, hal ini menunjukkan 2 tahun terakhir capaian kinerja dalam kategori sangat baik.

4.MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN RPJMD

Tabel.3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021-2026

N O	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN		Kondisi Akhir
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		Target	Realis asi	Target	Realisasi	Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	84,5	84,5	84,75	85,705	-	-	-	-	-	-	-	-	85,705
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	81,54	81,54	81,75	81,66	-	-	-	-	-	-	-	-	81,66
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	100%	100%	100%	101,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	101,53 %
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan,	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	WTP

	Pendapatan dan Aset Daerah													
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
		17,25	17,25	17,35	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8
		100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi tahun 2022 untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Indek Kepuasan Masyarakat, capaian BPKPAD adalah sebesar 85,705, jika dilihat dari target RENSTRA sebesar 84,75 dan target RPJMD 85,50 angka perolehan sudah sesuai dengan target, bahkan melebihi dengan kategori sangat memuaskan.

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti target RENSTRA tahun 2022 adalah 100% sedangkan target RPJMD tidak ada. Untuk capaian target indikator ini dapat tercapai dengan baik dengan kategori sangat memuaskan.

Untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu Nilai SAKIP BPKPAD, capaian target BPKPAD adalah sebesar 81,75, jika dilihat dari target RENSTRA sebesar 81,66. Untuk capaian target indikator ini dapat tercapai dengan baik dan dalam kategori sangat memuaskan. Sedangkan target RPJMD 68,95 jika dibandingkan dengan target RPJMD capaian ini juga dalam kategori sangat memuaskan.

Selanjutnya yakni indikator kinerja yang keempat yaitu Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target, target RENSTRA yaitu sebesar 100%, capaian BPKPAD yaitu sebesar 101,53%. Hal ini menandakan bahwa capaian target indikator dapat tercapai dengan baik dan dalam kategori sangat memuaskan. Sedangkan target RPJMD tidak ada.

Indikator kinerja yang kelima yaitu hasil opini BPK dimana BPKPAD mendapatkan capaian WTP yang menunjukkan bahwa target indikator telah tercapai dengan baik dan dalam kategori sangat memuaskan. Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian indikator yang keenam yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan dengan hasil capaian 100% dari target 100% sehingga capaian ini masuk dalam kategori sangat memuaskan Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

Indikator kinerja yang ketujuh yaitu Derajat Otonomi Fiskal dengan capaian kinerja sebesar 17,8 dari target sebesar 17,35, dari target telah tercapai sebesar 102,59%. Capaian ini dalam kategori sangat memuaskan dan . Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

Yang terakhir yaitu indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dengan hasil kinerja 100% dari target 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja dalam kategori sangat memuaskan. Target ini merupakan pendukung dari indikator sasaran dari RPJMD dalam indeks pengelolaan keuangan daerah.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN PROPINSI

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Propinsi tidak ada kegiatan yang langsung turunan dari Propinsi karena BPKPAD merupakan unsur penunjang sehingga tidak ada realisasi kegiatan yang menjadi standar propinsi.

6. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara keseluruhan kinerja BPKPAD tahun 2022 rata rata telah mencapai target 100% bahkan lebih. Adapun yang belum tercapai 100% jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sudah ada peningkatan dalam prosentase capaiannya. Hal ini disebabkan karena BPKPAD selalu menerapkan nilai-nilai semangat guna mencapai keberhasilan dengan memegang kunci keberhasilan yaitu semangat, akuntabel, kompeten, tim work dan integritas atau disingkat **SAKTI**.

7. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi sumber daya di BPKPAD Kabupaten Demak tahun 2022 dapat dilihat dari jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Jumlah pegawai BPKPAD Kabupaten Demak tercatat sebanyak 46 orang terdiri dari laki – laki 29 orang (63%) dan perempuan 17 orang (37%). Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 (39%) sesuai dengan tabel berikut.

Tabel. 3.8
Pegawai BPKPAD Kabupaten Demak Menurut Unit Kerja dan
Tingkat Pendidikan Tahun 2022

N O	SEK/BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLT A	D3/ SM	S-1	S-2	S-3	
1.	SEKRETARIAT	-	-	1	-	3	5	-	9
2.	PERBEN AKUN	-	-	2	-	-	3	-	5
3.	ANGGARAN	-	-	-	-	3	4	-	7
4.	ASET			1	-	4	3		8
5.	PENDAPATAN	-	-	3	2	9	3	-	17
JUMLAH (ORANG)		-	-	7	2	19	18	-	46
Persentase (%)		-	-	15	5	41	39	-	100

Sumber: BPKPAD Kab. Demak

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa pegawai di BPKPAD sangat terbatas jumlahnya. Dari jumlah 46 orang tersebut 19 orang adalah pejabat struktural/ analis sedangkan 27 (dua puluh tujuh) orang adalah staf/pelaksana. Untuk staf/pelaksana kebanyakan ada di Bidang Pendapatan. Hal ini sungguh sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja di BPKPAD yang sangat banyak. Kebutuhan ideal pegawai di BPKPAD sekitar 99 (Sembilan Puluh Sembilan) orang dan hanya dicukupi oleh jumlah pegawai PNS sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dan untuk mencukupi kebutuhan itu saat ini dibantu tenaga honorer sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, dan BPKPAD masih memerlukan PNS yang berkedudukan sebagai arsiparis, Jabatan Fungsional Perencana Anggaran, Jabatan Fungsional Analisis Pendapatan, jabatan penata keuangan, jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan, jabatan pengelola daftar gaji, jabatan analisis perbendaharaan, jabatan pengadministrasi pajak, jabatan analis pendapatan daerah, jabatan pengolah pemanfaatan barang milik daerah, dan jabatan JFT pranata komputer .

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut di atas perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada maka kiranya dalam penambahan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak perlu memilih pegawai yang memiliki latar belakang pekerjaan atau disiplin ilmu pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah hal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing masing bidang tugas yang di emban. Dalam rangka mengatasi kondisi kurangnya sumber daya manusia BPKPAD mengambil langkah dengan mengikutsertakan karyawan/karyawati dalam Bintel-Bintel dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan system akuntansi dan IT Based System yang lebih rumit maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti IT serta aplikasi Sistem Informasi Keuangan yang handal yang terintegrasi dari proses perencanaan e-planning, penganggaran e-budgeting dan penatausahaan SIMDA fmis dan aplikasi SIPANDA.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Demak berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional organisasi sehingga perlu dipelihara dan diamankan mencakup ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara umum jumlah dan kondisi sarana dan prasarana BPKPAD sudah cukup baik dan memadai.

8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program kegiatan yang mendukung tercapainya tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

8.1 Analisis program kegiatan

Tabel.3.9
Pencapaian Kinerja Program

NO	PROGRAM	KEGIATAN	% rata-rata capaian kinerja	% Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		100	89,08	10,92	112,26
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	88,88	11,12	112,51
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	95,84	4,16	104,34
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	90,45	9,55	110,06
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	77,67	22,33	128,75
		Penyediaan Jasa Penunjang	100	84,50	15,5	118,34

		Urusan Pemerintah Daerah				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,21	7,79	108,45
2	PROGRAM PENGEL OLAAAN KEUANGAN DAERAH		100	99,16	0,84	100,85
		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	91,07	8,93	109,81
		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100	98,00	2,00	102,04
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	93,22	6,78	107,27
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,19	0,81	100,82
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100	90,58	9,42	110,40
4		Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	90,58	9,42	110,40
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		144	96,25	47,75	149,61
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	106,42	96,25	10,17	110,57

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*, serta terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara *input* dan *output*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa *output* yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik bersifat tidak terwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Analisis Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 89,08%, tingkat efisiensi 10,92%, dan tingkat efektivitas 112,26%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 88,88%, tingkat efisiensi 111,12%, dan tingkat efektivitas 112,51%. Analisis Capaian kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar

90,45%, tingkat efisiensi 9,55%, dan tingkat efektivitas 110,06%. Analisis Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 77,67%, tingkat efisiensi 22,33%, dan tingkat efektivitas 128,75%. Analisis Capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 84,50%, tingkat efisiensi 15,5%, dan tingkat efektivitas 118,34%. Analisis Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 92,21%, tingkat efisiensi 7,79%, dan tingkat efektivitas 108,45%.

Analisis Capaian kegiatan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 99,16%, tingkat efisiensi 0,84%, dan tingkat efektivitas 100,85%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan penyusunan anggaran daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 91,07%, tingkat efisiensi 8,93%, dan tingkat efektivitas 109,81%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 98,00%, tingkat efisiensi 2,00%, dan tingkat efektivitas 102,04%. Analisis Capaian kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 93,22%, tingkat efisiensi 6,78%, dan tingkat efektivitas 107,27%. Analisis Capaian kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 99,19%, tingkat efisiensi 0,81% dan tingkat efektivitas 100,82%.

Analisis Capaian program pengelolaan barang milik daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 100%, penyerapan anggaran sebesar 90,58%, tingkat efisiensi 9,42%, dan tingkat efektivitas 110,40%. Analisis Capaian kegiatan dalam hal ini karena dalam program ini hanya ada satu kegiatan dan nama kegiatan serta target yang sama otomatis capaian rata-rata kinerja penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dan efektivitas sama dengan program.

Analisis Capaian program pengelolaan pendapatan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 144%, penyerapan anggaran sebesar 96,25%, tingkat efisiensi 47,75%, dan tingkat efektivitas 149,61%.

Untuk program ini hanya ada satu kegiatan dengan nama yang sama. Analisis Capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yaitu tingkat capaian rata-rata kinerja 106,42%, penyerapan anggaran sebesar 96,25%, tingkat efisiensi 10,17%, dan tingkat efektivitas 110,57%.

Tabel 3.10

8.2 Analisis sasaran, program yang mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	% rata-rata capaian kinerja sasaran	% Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik BPKPAD	Indek Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	100	89,08	10,92	112
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	100	89,08	10,92	112
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BPKPAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,16	0,84	101

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	% rata-rata capaian kinerja sasaran	% Penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target	Semua Program di BPKPAD	100	98,62	1,38	101
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Hasil opini BPK	Semua Program di BPKPAD	100	98,62	1,38	101
6	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan pendapatan dan aset pemerintah daerah yang optimal	1.Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	99,16	0,84	101

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	% rata-rata capaian kinerja sasaran	% Penyerap an anggaran	Tingkat efisiensi (%)	Tingkat Efektivi tas (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perundangan					
		2.Derajat Otonomi Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	96,25	3,75	104
		3.Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	90,58	9,42	110

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*, serta terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara *input* dan *output*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa *output* yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik bersifat tidak terwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Analisis Capaian Indikator Kinerja yang pertama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian indikator kinerja adalah sebesar 85,705, dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 89,08%, tingkat efisiensi 10,92%, dan tingkat efektivitas 112%.

Untuk indikator kinerja yang kedua yaitu Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%, tingkat

penyerapan anggaran sebesar 89,08%, tingkat efisiensi 10,92%, dan tingkat efektivitas 112%.

Untuk indikator kinerja yang ketiga yaitu Nilai SAKIP BPKPAD, capaian indikator kinerja adalah sebesar 81,75, tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,16%, tingkat efisiensi 0,84%, dan tingkat efektivitas 101%.

Selanjutnya yakni indikator kinerja yang keempat yaitu Persentase indikator kinerja sasaran strategis BPKPAD yang mencapai target, capaian Indikator kinerja yaitu sebesar 101,53%. tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,62%, tingkat efisiensi 1,38%, dan tingkat efektivitas 101%.

Indikator kinerja yang kelima yaitu hasil opini BPK dimana BPKPAD mendapatkan capaian WTP tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,62%, tingkat efisiensi 1,38%, dan tingkat efektivitas 101%.

Kemudian indikator yang keenam yaitu Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Kaidah Perundangan dengan hasil capaian 100% tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,16%, tingkat efisiensi 0,84%, dan tingkat efektivitas 101%.

Indikator kinerja yang ketujuh yaitu Derajat Otonomi Fiskal dengan capaian kinerja sebesar 17,8 dari target sebesar 17,35, dari target telah tercapai sebesar 102,59%. tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,25%, tingkat efisiensi 3,37%, dan tingkat efektivitas 104%.

Yang terakhir yaitu indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mampu Mengelola Aset Dengan Baik dengan hasil kinerja 100% dari target 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja dalam kategori sangat memuaskan. tingkat penyerapan anggaran sebesar 90,58%, tingkat efisiensi 9,42%, dan tingkat efektivitas 110%.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DPPA Pada tahun anggaran 2022, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan 4 program 12 kegiatan 53 sub kegiatan dengan total anggaran belanja Rp. **470.095.044.819,-** dengan capaian realisasi sebesar Rp. 463.626.301.563 atau sebesar 98,62 % dengan Program/Kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.11

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	PROGR AM	KEGIATAN	ANGGARAN		TING KAT CAPA IAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PROGR AM PENUNJ ANG URUSA N PEMERI NTAHAN KABUPA TEN/KO TA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.060.875. 358	13.385.731 .683	88,88
		1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.184.542.708	12.512.846.643	88,21
		2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	876.332.350	872.885.040	99,61
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	393.191.000	376.849.063	95,84
		3 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	17.500.000	14.152.500	80,87
		4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	375.691.000	362.696.563	96,54
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	410.982.500	371.736.358	90,45
		5 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.750.000	97,50
		6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.088.500	154.028.095	98,05
		7 penyediaan bahan logistic kantor	103.380.000	75.197.650	72,74
		8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.974.000	27.964.000	87,46
		9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	9.640.000	6.180.000	64,11
		10 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.900.000	98.617.013	99,71
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.963.589	74.535.000	77,67
		12 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43.250.000	33.855.000	78,28
		13 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	52.713.589	40.680.000	77,17
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.400.000	234.138.255	84,50

		14	Penyediaan jasa surat menyurat	6.400.000	6.400.000	100
		15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	271.000.000	227.738.255	84,04
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		692.399.311	638.457.202	92,21
		16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	168.618.311	143.064.032	84,84
		17	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	380.481.000	355.023.020	93,31
		18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	143.300.000	140.370.150	97,96
			JUMLAH I	16.930.811.758	15.081.447.961	89,08
2	PROGR AM PENGEL OLAAN KEUANG AN DAERA H	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		732.585.000	667.176.712	91,07
		1	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	70.674.000	55.709.704	78,83
		2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	60.754.000	42.886.361	70,59
		3	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	262.270.000	259.444.646	98,92
		4	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	244.297.000	233.362.989	95,52
		5	Koordinasi dan penyusunan regulasi kebijakan bidang anggaran	94.590.000	75.773.012	80,11
		Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah		782.160.000	767.071.700	98,0
		6	Koordinas dan pengelolaan kas daerah	100.000.000	97.544.300	97,54

7	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	14.050.000	14.050.000	100
8	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	24.000.000	23.617.000	98,40
9	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.000.000	12.877.000	99,05
10	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	533.041.000	521.824.400	97,90
11	Pembinaan Penatausahaan keuangan kabupaten/kota	98.069.000	97.159.000	99,07
Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah		691.081.000	644.191.320	93,22
11	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban	51.298.000	51.050.000	99,52
11	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	154.818.800	150.449.557	97,18
12	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	317.969.500	308.682.656	97,08
13	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	28.468.000	24.305.300	85,38
1	Penyusunan kebijakan	52.822.700	24.529.077	46,44

		4	dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah			
		15	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	85.704.000	85.174.730	99,38
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		424.775.836.000	421.328.740.900	99,19
		16	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	422.175.836.000	421.328.740.900	99,80
		17	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	2.600.000.000	-	-
			JUMLAH II	426.961.662.000	423.407.180.632	99,16
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.130.000.000	1.023.567.850	90,58
3	PROGR AM PENGEL OLAA N BARAN G MILIK DAERA H	1	Penyusunan standar harga	34.750.000	25.095.125	72,22
		2	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	3.500.000	3.495.910	99,88
		3	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	3.500.000	3.495.910	99,88
		4	Penatausahaan barang milik daerah	5.000.000	3.975.000	79,50
		5	Inventarisasi barang milik daerah	141.600.000	137.550.000	97,14
		6	Pengamanan barang milik daerah	279.200.000	234.846.850	84,11
		7	Penilaian barang milik daerah	10.000.000	10.000.000	100
		8	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	352.950.000	340.919.706	96,59
		9	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	44.300.000	43.939.000	99,19
		10	Penyusunan laporan barang milik daerah	6.000.000	5.999.994	100
		11	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah	249.200.000	214.250.355	85,98

			kabupaten/kota			
			JUMLAH III	1.130.000.000	1.023.567.850	90,58
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.052.571.061	24.114.105.120	96,25	
4	PROGR AM PENGE LO LAAN PENDA PATAN DAERA H	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	1.428.926.000	1.216.611.389	85,14
		2	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	12.220.000	11.235.000	91,94
		3	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	247.654.700	223.291.750	90,16
		4	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	29.550.000	28.127.000	95,18
		5	Penetapan wajib pajak daerah	3.569.859.250	2.996.085.260	83,93
		6	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	19.764.361.111	19.638.754.721	99,36
			JUMLAH IV	25.052.571.061	24.114.105.120	96,25
			JUMLAH I + II + III + IV	470.095.044.819	463.626.301.563	98,62

Dari uraian tabel diatas terlihat bahwa capaian realisasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah telah mampu terealisasi sebesar 98,62 % dan angka tersebut termasuk kategori capaian sangat tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2022 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 telah melampaui target yang ditentukan sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2022 pada kategori **sangat baik**.

Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 98,62% atau dengan kategori **sangat baik**.

Pelaksanaan Program / kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Jumlah pendapatan asli daerah dari target Rp. 448.422.777.712 terealisasi sebesar 477.199.961.524,94 atau 106,42%
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak di Web nya BPKPAD maupun web nya Pemkab Demak.
3. Pemberian hadiah percepatan pembayaran PBB-P2 tahun 2022 bagi wajib pajak pembayar tercepat.
4. Integrasi pelayanan BPHTB dengan PBB
5. Pengurangan sangsi administrasi berupa denda PBB-P2 sebagai upaya memotivasi wajib pajak melunasi hutang pajak.
6. Jemput bola pembayaran pajak daerah pada hari libur

7. Pemanfaatan system keamanan barcoding pada id-billing dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
8. Pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Penyampaian SPPT PBB-P2 dapat didownload melalui e – SPPT pada Sipanda.
10. Penilaian kembali obyek PBB-P2.
11. Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (pemutakhiran data piutang) pajak daerah.
12. Pendataan dan pemutakhiran data pada obyek pajak reklame dan pajak air tanah.
13. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dikirim ke BPK Perwakilan Jawa Tengah tepat waktu dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
14. Dana Transfer dan Bangub telah tersalurkan tepat waktu.
15. Pelaksanaan SP2D online yang terkoneksi dengan Bank Jateng semakin mempercepat proses pengajuan pencairan uang yang diajukan oleh OPD.
16. Selama 10 tahun terakhir Perda APBD dapat ditetapkan tepat waktu. Perda APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 28 Desember 2012, sedangkan Perda APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 ditetapkan tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya Perda APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan tanggal 30 Desember 2014. Perda APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2015. Kemudian APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 APBD tahun 2019 ditetapkan dengan Perda Nomor 17 tahun 2018 pada tanggal 21 Desember 2018. APBD tahun 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 16 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019. APBD tahun 2021 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 29 Desember 2020. APBD tahun 2022 ditetapkan dengan Perda APBD Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021. APBD tahun 2023 ditetapkan dengan Perda APBD Nomor: 11 tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak.
3. Masih terbatasnya pelayanan pajak di pedesaan. Masih terdapat OPD yang kurang konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
4. Adanya pergantian pengurus barang yang baru saja mendapatkan pendampingan sehingga pendampingan harus dimulai dari awal lagi.
5. Sulitnya mencari bukti dukung yang kuat dan lengkap atas kepemilikan tanah.
6. Kesulitan menunjuk titik-titik batas tanah yang harus diambil menggunakan GPS.
7. Masing-masing institusi memiliki kekhasan dalam proses koordinasi, sehingga butuh waktu dan komunikasi secara intensif untuk dapat bersinergi.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

Strategi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah atau sebaliknya berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Demak terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan,
2. Memberikan reward terhadap wajib pajak dan petugas pajak yang baik dan tepat waktu.
3. Pengusulan penambahan layanan dari Bank Jateng.

4. Mengintensifkan pelayanan pembayaran pajak ke desa-desa oleh staf BPKPAD.
5. Meningkatkan layanan jaringan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset.
7. Mengintensifkan pembinaan dan sosialisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak di masa yang akan datang.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**



**Drs. Agus Musyafak, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001**